

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis Pengelolaan Logistik Obat merupakan salah satu kegiatan di Puskesmas. Analisis pengelolaan logistik obat meliputi tahap permintaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, penghapusan, evaluasi dan monitoring yang saling terkait satu sama lain, sehingga harus terkoordinasi dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam manajemen logistik obat di Puskesmas adalah kurang maksimalnya peran apoteker dalam menjalankan tugasnya (Noordiyah, dkk 2021).

Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, ketersediaan obat dan Vaksin di puskesmas di Indonesia telah mengalami peningkatan secara signifikan dari 79,38% di tahun 2015 menjadi 94,22% di tahun 2019. Capaian ini diantaranya Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 98,53%. Kemudian berdasarkan Laporan Kinerja Dinkes Sumatera Barat tahun 2019 diketahui bahwa persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas Kota Padang telah mencapai angka 100%. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan dimana Proyek Pengkajian Sumber Daya Kesehatan (PPSDK) bidang farmasi menemukan bahwa paling tidak 42% puskesmas pernah mengalami kekosongan obat selama periode pelayanan.

World Health Organization (WHO) 2019 mengatakan bahwa Indonesia telah dilibatkan dalam survei tentang harga obat, ketersediaan, perencanaan dan keterjangkauannya. di perkirakan ada sekitar 40% dana kesehatan yang dialokasikan di berbagai penyelenggara pelayanan kesehatan di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan. Pendanaan Puskesmas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan lain sebagainya.

Selain itu dana sah lainnya berasal dari badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial (BPJS) kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang berasal dari APBD bersumber dari pendapatan asli daerah sebanyak 50% dan dana perimbangan. Sedangkan dana perimbangan mencakup dana alokasi khusus yang berasal dari APBN (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas merupakan salah satu fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki prioritas dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan promotif dan preventif, menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta menjadikan masyarakat yang mandiri dalam menjaga kesehatan individu dan keluarga masing-masing. Sebagai pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan, Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam pengadaan dan perencanaan obat yang dibutuhkan Puskesmas sebagai upaya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu. Puskesmas diharuskan membuat perencanaan kebutuhan obat yang nantinya akan di usulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Reski, et.al, 2016).

Permintaan obat adalah salah satu tahap utama dalam pengelolaan logistik obat untuk menentukan ketersediaan obat agar efektif dan efisien. Tingkat keberhasilan atau kegagalan pengelolaan obat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat. Sebagai contoh dalam merencanakan barang yang pengadaannya melebihi kapasitas atau kebutuhan. Jika kebutuhan item seharusnya 100 unit, namun direncanakan lebih dari itu maka akan terjadi pemborosan penganggaran, pembengkakan pada biaya pengadaan, penyimpanan, tidak adanya pendistribusian obat sehingga terjadi kerusakan atau kadaluarsa yang menumpuk di gudang penyimpanan obat, di unit pelayanan kesehatan khusus nya pusat kesehatan masyarakat (Permenkes No 5 tahun 2023).

Permintaan logistik obat di Puskesmas yang baik terdiri dari tahap pemilihan obat yang disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas berdasarkan pola konsumsi, pola penyakit, pemakaian obat terbanyak, pola kunjungan dan juga berdasarkan Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Selanjutnya dilakukan tahap kompilasi pemakaian obat yang dilihat dari kartu stok obat, kartu pemakaian obat harian, LPLPO, kertas resep, dan laporan obat. Pada tahap perhitungan kebutuhan obat dapat digunakan beberapa metode seperti metode konsumsi, metode morbiditas, ataupun metode proyeksi tingkat pelayanan. Pemilihan metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas (Permenkes No. 21 Tahun, 2020).

Metode yang digunakan harus melalui tahap proyeksi kebutuhan obat dapat dilakukan dengan penentuan rancangan stok akhir, anggaran, ataupun pengadaan obat tahun mendatang. Berdasarkan pedoman penyusunan rencana kebutuhan obat dan pengendalian persediaan obat di Puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat yang baik akan terlaksana apabila dilakukan dengan berdasarkan metodologi dan analisa kebutuhan yang sesuai serta menggunakan data-data yang valid sehingga hasil dari perencanaan yang dilakukan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan (Permenkes No. 21 Tahun, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Marissa Novi Rumondang (2015) tentang analisis perencanaan obat menunjukan bahwa proses perencanaan obat belum sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh tenaga pengelola obat yang belum memahami tentang proses perencanaan obat sehingga dalam perencanaan kebutuhan obat tidak terlaksana dengan optimal. Selain itu, penentuan kebutuhan obat yang dilakukan tidak berdasarkan pada Fornas dan e-katalog. Masalah yang timbul ini merupakan salah satu akibat dari tidak adanya pelatihan yang diikuti oleh tenaga pengelola obat.

Penelitian terdahulu terkait perencanaan obat dilakukan oleh Gusti Fauzi di Puskesmas Salido Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 didapatkan hasil bahwa dalam perencanaan obat yang dilakukan masih terdapat data yang belum lengkap, diantaranya belum digunakan data populasi dan pertumbuhan penduduk dalam perencanaan obat. Selanjutnya diketahui bahwa obat yang tersedia belum memenuhi permintaan pasien. Selain itu, tenaga kesehatan di Puskesmas belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan perencanaan obat.

Berdasarkan penelitian oleh Rinada Jeysi Mailoor, dkk (2013) mengenai Analisis pengelolaan obat di Puskesmas Donowudu Kota Bitung menyatakan bahwa kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait menyebabkan beberapa kegiatan serta pengelolaan obat di Puskesmas belum terlaksana dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia menyebabkan sistem manajemen pengelolaan obat di Puskesmas tidak berjalan optimal.

Menurut penelitian Nordiyah dkk (2021) Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Landasan Ulin menyatakan komponen input SDM yang tersedia di Puskesmas Landasan Ulin sudah mencukupi namun untuk pendidikan dan pelatihan belum maksimal. Sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mencukupi dikarenakan kurang luas dan fasilitas penyimpanan yang terbatas. Dari segi komponen proses permintaan obat belum berjalan dengan dikarenakan baik masih terpenuhinya permintaan obat oleh belum Dinas Kesehatan. Proses penyimpanan obat masih ada kekurangan dimana kurang luasnya tempat untuk penyimpanan obat dan sediaan farmasi lainnya. Proses pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam manajemen logistik obat masih belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan laporan dari Instalasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang dari 24 Puskesmas yang ada di Kota Padang, ada beberapa Puskesmas yang kinerja di

bidang farmasi (logistik obat), sarana prasarana alat kesehatannya masih rendah, masih kurang nya SDM, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan salah satunya Puskesmas Ambacang. Puskesmas Ambacang melakukan Perencanaan dan Pengadaan logistik obat di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana di Puskesmas ini masih ada masalah mengenai SDM yaitu Tenaga Apoteker kurang maksimal dalam menjalankan tugas, selain itu masih kurang memenuhi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas Ambacang yang sesuai dengan Permenkes No 26 Tahun 2020.

Berdasarkan data dari Puskesmas Ambacang hanya memiliki 1 apoteker yang mengalami kendala kesehatan akibat stroke ringan serta faktor usia, sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, sebagian besar tugas pengelolaan logistik obat harus dialihkan kepada 1 asisten apoteker, yang kini menghadapi beban kerja berlebih. Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah pasien, dari 5.000 pasien pada tahun 2023 menjadi 6.000 pasien pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 20%. Peningkatan jumlah pasien ini menuntut sistem manajemen logistik obat yang lebih efisien agar ketersediaan obat tetap terjaga. Jika masalah ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan dalam pengadaan dan distribusi obat, yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sistem manajemen logistik obat di Puskesmas Ambacang serta mencari solusi strategis guna memastikan efektivitas pengelolaan obat meskipun terdapat keterbatasan tenaga farmasi.

Hasil survey awal di Puskesmas Ambacang yang dilakukan pada tanggal 10-12 Februari 2025 dengan melakukan wawancara kepada salah satu tenaga kesehatan didapatkan informasi bahwa pencatatan dan pelaporan manajemen logistik obat dilakukan bukan oleh apoteker melainkan oleh asisten apoteker dikarenakan apoteker

mengalami stroke ringan, pencatatan dan pelaporan di tangguhkan kepada asisten apoteker. Penyimpanan obat dilakukan dengan cara menyediakan gudang obat sebagai sarana penyimpanan. Puskesmas melakukan pendistribusian obat ke apotek dan postu, sedangkan untuk permintaan obat dari Puskesmas Ambacang langsung ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang, yang dilakukan 4 kali dalam setahun berdasarkan stok pemakaian obat yang sudah habis serta pencatatan dan pelaporan dibuat dalam kartu stok obat lalu disalin ke (LPPO) untuk pelaporannya.

Wawancara juga dilakukan kepada asisten apoteker menurut informasi yang di dapatkan masih ada masalah pada pelayanan penyimpanan obat, yang seperti masih terjadi kekurangan rak untuk penyusunan obat. Kondisi ini berdampak pada sistem penyimpanan obat yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020.

Sesuai dengan aturan Permenkes RI No 26 Tahun 2020. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang tenaga Apoteker dan di dampingi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, untuk gudang dan kamar obat mempunyai parameter yang di persyaratkan antara lain memiliki luas minimal 3x4 m, adanya ventilasi, adanya cahaya yang cukup, lantai terbuat dari semen, dinding dibuat licin, mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda khusus narkotik dan psikotropika yang terkunci. namun di Puskesmas Ambacang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Logistik Obat di Puskesmas Ambacang tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Pengelolaan Logistik Obat di Puskesmas Ambacang Tahun 2025?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang pada tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Dianalisis input dalam pelaksanaan logistik obat yang meliputi SDM, SOP, sarana dan prasarana dalam pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Kota Padang tahun 2025.
- b. Dianalisis proses pengelolaan logistik obat yang meliputi permintaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pencatatan pelaporan dan pemusnahan dalam pelaksanaan manajemen logistik obat di Puskesmas Ambacang Kota Padang tahun 2025.
- c. Dianalisis output dari pelaksanaan proses Pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Kota Padang 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti, khususnya di bidang ilmu kesehatan masyarakat mengenai pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang tahun 2025.

- b. Bagi peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber, penunjang, ataupun referensi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan logistik obat di Puskesmas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Alifah Padang

Sebagai bahan bacaan dan sumber referensi serta menambah kepustakaan, khususnya terkait pengelolaan logistik.

b. Bagi Puskesmas Ambacang

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Puskesmas Ambacang dapat menjadikan sebagai salah satu pedoman evaluasi pelayanan kesehatan lebih terkhususnya kepada pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Kota Padang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Kota Padang tahun 2025. Jenis penelitian *kualitatif* dengan pendekatan studi kasus yang akan dilakukan di Puskesmas Ambacang pada bulan Maret-Agustus tahun 2025. Informan dalam penelitian ini 4 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan penelitian menggunakan panduan wawancara, telaah dokumen dan observasi menggunakan tabel ceklist sedangkan data sekunder diperoleh dari Puskesmas Ambacang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber dan metode.